

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Fenomena permasalahan sampah menjadi salah satu masalah sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup> Selain itu, sampah juga berupa bahan buangan dari aktifitas manusia dan hewan yang umumnya dalam bentuk padat dan sudah tidak terpakai atau dibutuhkan lagi.<sup>2</sup> Indonesia sudah lama memiliki permasalahan sosial yang disebabkan oleh timbulan sampah, salah satunya yaitu banjir. Menurut SNI 19-2452-2002, timbulan sampah didefinisikan sebagai jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu masyarakat, dalam satuan volume dan per kapita per hari, baik dengan perluasan bangunan, maupun perluasan jalan.<sup>3</sup>

Menurut SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) terdapat timbulan sampah sebanyak 33,113,277.69 ton pertahun di Indonesia, yang terdiri dari 275 kabupaten/kota se-Indonesia pada tahun 2020. Ada 40,71% atau sebanyak 13,481,661.61 (ton/tahun) merupakan sampah yang tidak terkelola. Pengurangan sampah hanya sebesar 13.47% atau 4,461,873.02 (ton/tahun).<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa timbulan

---

<sup>1</sup> JDIIH BPK RI, 2017. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*

<sup>2</sup> Tchobanoglus, Theisen dan Vigil (1993), *Integrated Solid Waste Managemen*, Singapore: Mc Graw-Hill Book Co.

<sup>3</sup> Kementerian Lingkungan Hidup, 2020, *Data Statistik Sampah di Indonesia*, Jakarta: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSAN)

<sup>4</sup> Kementerian Lingkungan Hidup, 2020, *Data Statistik Sampah di Indonesia*, Jakarta: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSAN)

sampah dengan pengurangan sampah memiliki perbandingan angka yang sangat jauh dimana sampah tidak terkelola dengan manajemen yang baik. Indonesia termasuk dalam 10 negara terpadat di dunia. Padatnya penduduk dapat menambah jumlah volume sampah yang dihasilkan, terlebih Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah konsumsi rumah tangga yang tinggi. Sebanyak 40,4% sampah di Indonesia berasal dari sisa makanan masyarakat, 17,1% sampah di Indonesia berasal dari plastik, 13,9% berasal dari daun atau kayu, dan 12% berasal dari sisa kertas atau karton.<sup>5</sup>

Jenis sampah di Indonesia dominan dihasilkan dari sampah makanan dan plastik, yang menandakan banyaknya jumlah konsumsi masyarakat di Indonesia terlebih pada rumah tangga. Opini tersebut didukung dengan data sebanyak 38,3% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga, 17,2% berasal dari pasar tradisional, dan 15,5% berasal dari kawasan.<sup>6</sup> Melihat data tersebut sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Permasalahan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, sering kali di daerah terpencil justru sampah menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan tangani pemerintah daerah setempat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan ada sebanyak 0,4 kg sampah dihasilkan oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

perorangan setiap harinya, jika dikalikan dengan 1,1 juta masyarakat Kabupaten Kuningan maka akan menghasilkan 440 juta ton perhari.<sup>7</sup>

Kesadaran masyarakat akan sampah yang masih kurang, lalu tidak disediakannya Tempat Pembuangan Akhir atau (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara atau (TPS) menjadi salah satu pemicu sampah semakin menumpuk di masyarakat Kuningan.<sup>8</sup> Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas bagi desa dan kelurahan, karena sumber utama penghasil sampah berasal dari sampah rumah tangga yang belum terpilah, baik itu sampah organik maupun non-organik. Hal ini sejalan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, dan Pergub Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa setiap desa dan kelurahan wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).<sup>9</sup> Adapun delapan titik lokasi bak sampah itu, yakni Desa Haurkuning dan Desa Nusaherang di Kecamatan Nusaherang, Desa Ragawacana di Kecamatan Kramatmulya, Desa Babakan Mulya di Kecamatan Jalaksana, Desa Caracas dan Desa Sampora di Kecamatan Cilimus, Desa Kertayasa di Kecamatan Sindang Agung, serta Desa Karanganyar di Kecamatan Darma.<sup>10</sup>

Salah satu daerah yang mengalami permasalahan sampah di Kabupaten Kuningan yakni Desa Babakanreuma, dengan jumlah penduduk 4.026 jiwa. Jika melihat data potensi sampah yang dihasilkan mencapai 0,4

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>9</sup> Perda Kabupaten Kuningan Jawa Barat, *Tentang Pengelolaan Sampah Nomor 4 Tahun 2010*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1

kg per orang maka total sampah yang dihasilkan di Desa Babakanreuma mencapai 1,6 ton/hari. Namun permasalahan utama yang terjadi adalah tidak adanya TPS di Desa Babakanreuma, akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan lingkungan. TPS yang telah disebar oleh Dinas Lingkungan Hidup dirasa masih kurang, salah satunya tidak disediakan TPS untuk Desa Babakanreuma.

Masyarakat Desa Babakanreuma tidak memiliki fasilitas untuk membuang sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Ini menjadikan masyarakat Desa Babakanreuma kesulitan untuk membuang sampah. Dengan demikian banyak warga yang membuang sampahnya sembarangan. Beberapa warga di Desa Babakanreuma memilih mengolah sampah dengan berbagai macam. Seperti mengolahnya dengan membakarnya di depan rumah, mengubur sampah, dan membuang sampahnya ke sungai. Membuang sampah ke sungai menjadi cara yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Babakanreuma dalam menangani sampah, ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak lama.

Salah satu persoalan yang muncul dari tidak adanya fasilitas pembuangan sampah di Desa Babakanreuma adalah perilaku membuang sampah ke sungai yang dilakukan oleh masyarakat desa. Membuang sampah ke sungai merupakan konsekuensi dari kurangnya fasilitas pembuangan sampah. Dampak dari perilaku tersebut antara lain persoalan pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan menjadi tempat pembuangan

sampah, meningkatkan persoalan penyakit akibat penumpukan sampah di pinggiran sungai dan persoalan banjir. Sungai memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Babakanreuma. Persoalan sampah yang dibuang kesungai salah satunya menyebabkan pendangkalan sungai dan berbagai persoalan lainnya. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai konflik di masyarakat seperti konflik laten antara pemilik lahan dengan masyarakat yang membuang sampah, masyarakat yang membuang sampah dengan pengguna sungai sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Di Desa Babakanreuma bentuk konflik akibat perilaku masyarakat yang membuang sampah kesungai antara lain ketegangan, kekecewaan, kerugia, protes.

Konflik tersebut diakibatkan alih fungsi peran sungai yang saat ini didominasi sebagai tempat pembuangan sampah. Berubahnya peran sungai seiring dengan dampak yang muncul di Desa Babakareuma antara lain polusi air (air menjadi kotor dan bau yang tidak sedap) sehingga sungai tidak dapat digunakan sebagai sumber mata air masyarakat atau sumber irigasi sawah petani, polusi tanah ( kandungan zat dari sampah berdampak pada penurunan kualitas tanah), polusi udara (sampah yang menumpuk dan berbau menyebabkan polusi udara disekitar tumpukan sawah yang ada di sepanjang sungai). Konflik di Desa Babakanreuma disebabkan oleh pengelolaan sampah masyarakat sekitar dengan membuangnya ke sungai dan ke lahan milik orang lain. Sungai memiliki potensi dan kegunaan bagi

masyarakat sekitar sebagai sarana alam, karena jika terjadi pencemaran air sungai tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Selain itu, konflik di Desa Babakanreuma terjadi karena beberapa masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketegangan. Contohnya, ketegangan antara pemilik lahan dan masyarakat yang kerap kali membuang sampah sembarangan, ketegangan juga disebabkan adanya alih fungsi lahan yang dilakukan beberapa masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangganya.<sup>11</sup> Ketegangan di Desa Babakanreuma terjadi karena permasalahan sampah yang menuai konflik laten, di mana sudah adanya upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui musyawarah yang belum memberikan hasil maksimal. Akhirnya masyarakat mengupayakan untuk diatasi melalui intervensi desa, dan berhasil memberikan dampak positif bagi konflik yang terjadi di Desa Babakanreuma.

Dengan demikian penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana konflik terbentuk dan resolusi konflik yang dilakukan oleh pihak desa Babakanreuma sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang tidak kunjung teratasi dengan baik, dan mencegah adanya konflik yang besar dimasa yang akan datang. Sehingga penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang “Resolusi Konflik Melalui Pengelolaan Sampah” dengan studi kasus BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan”.

---

<sup>11</sup> Hasil Observasi di Lapangan yang Dilakukan Peneliti

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Keberadaan sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Membuang sampah sembarangan yang disebabkan tidak disediakannya TPA atau fasilitas oleh pemerintah daerah, membuat beberapa pihak kontra dengan lingkungan yang kian tercemar. Aliran sungai yang tidak dapat digunakan kembali sebagai pemenuh kebutuhan dan alih fungsi lahan membentuk tumpukan sampah yang mengubah estetika lingkungan, menjadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Upaya mengatasi dan menanggulangi konflik yang disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan sampah, didirikanlah program BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma untuk mengelola sampah. Program yang dibentuk pemerintah desa tersebut mengatasi permasalahan sampah di masyarakat dengan baik melalui berbagai tahapan. Peneliti membatasi permasalahan penelitian agar lebih fokus dan mempermudah dalam proses penelitian. Permasalahan penelitian yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana gambaran konflik laten dalam pengelolaan sampah di Desa Babakanreuma?
2. Bagaimana peran BUMDes dalam pengelolaan sampah Desa Babakanreuma?
3. Bagaimana proses resolusi konflik yang dibangun oleh Pemerintah Desa Babakanreuma dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah masyarakat?

### 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan gambaran konflik laten dalam pengelolaan sampah di Desa Babakanreuma.
- b. Untuk mendeskripsikan peran BUMDes dalam pengelolaan sampah Desa Babakanreuma.
- c. Untuk menganalisis proses resolusi konflik yang dibangun oleh Pemerintah Desa Babakanreuma dalam mengatasi persoalan pengelolaan sampah masyarakat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengetahuan di bidang sosiologi, khususnya sosiologi lingkungan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang menimbulkan konflik sosial-lingkungan, sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian.

#### b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan dapat menjadi referensi literature bagi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta terutama Program Studi Pendidikan sosiologi.

#### c. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, menambah pengalaman penelitian dan dapat memperkaya wawasan di bidang sosiologi lingkungan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran



kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar untuk menjaga ASRI (Aman, Sehat, Naungan, Asri) tanpa menimbulkan konflik masyarakat.

### 1.5. Tinjauan Penelitian Sejenis

Peneliti menggunakan beberapa kajian literatur dalam penelitian sejenis guna membantu dalam proses penelitian. Kajian penelitian ini menggunakan sebelas jurnal internasional, lima buku, tiga makalah, dan sepuluh jurnal nasional. Berikut adalah penelitian sejenis yang digunakan peneliti dengan hasil studinya masing-masing.

**Permasalahan pengelolaan sampah**, sampah merupakan masalah kultural karena dampaknya berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan terutama di kota-kota besar seperti yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Buruknya penanganan sampah memberikan dampak pada lingkungan, sehingga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan mulai dari masalah kesehatan hingga bencana banjir.<sup>12</sup> dalam jurnal yang berjudul *Municipal solid waste recycling and the significance of informal sector in urban China* yang ditulis oleh Roland Linzner dan Stefan Salhofer, Jurnal ini membahas bagaimana sampah menjadi suatu isu permasalahan yang ada di Cina. Cina menjadi salah satu negara yang paling banyak penduduknya di dunia, setiap harinya Cina menghasilkan sampah domestik dan Industri. Jurnal ini menjelaskan sampah yang bertambah setiap harinya

---

<sup>12</sup> Mulyadin, R. Mohama., Iqbal, Mohamad & Ariawan, Kuncoro. (2016). Konflik Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta Dan Upaya Mengatasinya (*Conflict Of Waste Management In Dki Jakarta And Its Recommended Solutions*). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No.2 179-191

karena tingkat konsumsi masyarakat meningkat yang menimbulkan permasalahan lingkungan dan sosial terjadi karena karena sampah.

Selain itu Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir dalam Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya, menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta penyumbang sampah terbanyak di TPA Piyungan, kemudian Kabupaten Sleman dan Bantul. Volume sampah tertinggi pada 2012 dan terus menurun sampai tahun 2014. Semua permasalahan ada dari sisi hilir (masyarakat), proses (pengelola sampah) dan hulu (TPA). dalam penelitian M. Reni Astuty, Kecamatan Ambarawa adalah sebuah kota pasar yang terletak di lingkaran segitiga antara Semarang, Solo, dan Jogjakarta. Dalam penelitian tersebut menjelaskan permasalahan yang dihadapi Ambarawa pada sistem perkotaan adalah kurang optimalnya bentuk dan peran masyarakat dan swasta dalam penataan dan pengelolaan perkotaan, salah satunya adalah pengelolaan sampah perkotaan.<sup>13</sup>

Sampah adalah sisa-sisa dalam bentuk padat dari kegiatan manusia sehari-hari dan/atau dari proses alam. Laju timbulan sampah terus meningkat, tidak hanya sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga dengan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Di sisi lain, kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam membuang sampah belum ideal. Sampah yang tidak ditangani dengan baik berdampak

---

<sup>13</sup> M. Reni Astuty.(2013). Peran Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1 (3), 223-240

pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.<sup>14</sup> Permasalahan utama sampah adalah permasalahan paradigma, perilaku dan kesadaran. Sedangkan teknologi pengolahan sampah dan TPA adalah urutan kesekian setelah faktor perilaku manusia. Perhatian utama kepada TPA sebagai solusi sepertinya telah membentuk karakter masyarakat yang tidak peduli sampah, tidak mau bertanggung jawab atas sampah, dan dimanjakan pemerintah.<sup>15</sup>

**Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah**, dalam permasalahan pengelolaan sampah masyarakat, faktor penyebab yang paling banyak terjadi yakni karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, dalam penelitian Riswan, dkk menjelaskan bawa pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan di sekitar rumah ataupun ke sungai telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga menimbulkan beberapa penyakit yang berbasis lingkungan serta mencemari Sungai Negara.<sup>16</sup>

Kurangnya kesadaran juga bisa saja ketika sudah tersedianya TPS namun masyarakat membuang sampah tanpa memilah jenis sampah, sehingga tertanam pola pikir bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.<sup>17</sup> Buruknya

---

<sup>14</sup> Riswan, Henna R, Agus H. (2011). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal ilmu lingkungan*, Vol.9, No.1

<sup>15</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, Rizqi. (2014). Strategi pengolahan sampah berkelanjutan. *EnviroScienteeae* 10 (2014) 33-40

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, Rizqi. (2014). Strategi pengolahan sampah berkelanjutan. *EnviroScienteeae* 10 (2014) 33-40

penanganan sampah memberikan dampak pada lingkungan, sehingga menyebabkan munculnya berbagai permasalahan mulai dari masalah kesehatan hingga bencana banjir.<sup>18</sup>

**Pembuangan sampah sembarangan,** pengelolaan dengan cara membuang sampah sembarangan sudah menjadi hal biasa di masyarakat Indonesia, dengan demikian permasalahan lingkungan muncul sehingga menimbulkan permasalahan sosial. Pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan di sekitar rumah ataupun ke sungai telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga menimbulkan beberapa penyakit yang berbasis lingkungan serta mencemari Sungai Negara.<sup>19</sup> Selain sudah disediakan TPS terkadang masyarakat membuang sampahnya dengan sembarangan di TPS.

Sebagian besar sampah- sampah yang ada di TPA adalah sampah rumah tangga yang dibungkus menggunakan plastik (bercampur organik dan anorganik). Karena adanya TPS dan TPA, maka masyarakat cenderung berpikir praktis dengan membuang sampah seadanya (tanpa perlakuan, pemisahan).<sup>20</sup> Pembuangan sampah sembarangan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. DKI Jakarta salah satu contoh

---

<sup>18</sup> Mulyadin ,R. Mohama., Iqbal, Mohamad & Ariawan, Kuncoro. (2016). Konflik Pengelolaan Sampah Di Dki Jakarta Dan Upaya Mengatasinya (*Conflict Of Waste Management In Dki Jakarta And Its Recomend Solutions*). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No.2 179-191

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, Rizqi. (2014). Strategi pengolahan sampah berkelanjutan. *EnviroScienteeae* 10 (2014) 33-40

kota yang sering terkena dampak banjir karena volume sampah yang menyumbat aliran air.

**Perbedaan kepentingan**, dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurul Yaqinah dalam Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendekatan Komunikasi Di Lingkungan Monjok Dan Karang Taliwang Kota Mataram, konflik yang terjadi antar warga Monjok dan Karang Taliwang karena satu sama lain tidak saling menghargai. Akar masalahnya adalah pemindahan container sampah, di mana kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda, perbedaan kepentingan mampu menyebabkan suatu konflik sosial yang ada di masyarakat. Simon Fisher (2001) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat suatu perbedaan pandangan atau presfekrif yang berbeda dalam suatu kehidupan bermasyarakat.<sup>21</sup> Menurut Simon Fisher (2001), konflik disebabkan oleh perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang bertentangan.<sup>22</sup>

Permasalahan sosial yang lebih kompleks terjadi di Cina. Perbedaan kepentingan mengenai pembangunan pembangkit listrik pembakaran sampah di Liulitun, Beijing, yang ditentang keras oleh warga setempat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Cina responsif terhadap tuntutan warga dan terus menyesuaikan strateginya dalam menyelesaikan konflik sosial. Dalam jurnal *When Frames Conflict: Policy Dialogue on Waste*, perbedaan kepentingan konflik lingkungan menjadi pemicu utama, dalam

---

<sup>21</sup> Simon fisher, 2001, *Mengelola Konflik*. Indonesia: The British Council.

<sup>22</sup> *ibid*

penelitian ini terdapat kebijakan yang pro dan kontra mengenai kebijakan sampah oleh pemerintah Finlandia. Perbedaan kepentingan terjadi mengenai pengelolaan sampah di negara tersebut.

**Konflik Sosial**, konflik sosial dalam kedudukannya sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat memiliki pengertian bertemunya dua kepentingan berbeda, di mana perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan hubungan persinggungan dan perselisihan.<sup>23</sup> dalam jurnal yang ditulis oleh Yanwei Li dengan judul *Governing environmental conflicts in China: Lessons learned from the case of the Liulitun waste incineration power plant in Beijing*, konflik lingkungan yang terjadi di Cina diakibatkan karena kurangnya kontribusi pemerintah daerah dalam menanggapi konflik sampah. Artikel ini menjelaskan studi kasus mendalam mengenai pembangunan pembangkit listrik pembakaran sampah di Liulitun, Beijing, yang ditentang keras oleh warga setempat.

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa negara Cina responsif terhadap tuntutan warga dan terus menyesuaikan strateginya dalam menyelesaikan konflik sosial. Sampah yang berawal dari masalah lingkungan dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.<sup>24</sup> *Nonhuman Actors, Hybrid Networks, and Conflicts Over Municipal Waste Incinerators* yang

---

<sup>23</sup> Wiwik setyani, 2016, Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik Ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik, *Jurnal Teosofi*

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.4

ditulis oleh Magnani menjelaskan konflik lingkungan tentang pengelolaan sampah dapat terjadi karena 3 sebab yakni mengabaikan faktor alam atau materi, menganalisis kontribusi teoretis dan metodologis teori jaringan aktor terhadap analisis konflik lingkungan, berfokus pada studi kasus dari Italia Utara mengenai konflik atas proyek insinerator limbah menjadi energi kota skala besar.

Selain Italia, Cina juga memiliki permasalahan lingkungan yang mengakibatkan permasalahan sosial yaitu konflik lingkungan akibat adanya sampah yang tidak terkelola dengan baik. Cina setiap tahunnya memiliki jumlah sampah terus meningkat dan menyebabkan permasalahan lingkungan dan sosial. Indonesia tentunya permasalahan sampah paling sering terjadi di kota metropolitan karena jumlah penduduk yang semakin banyak pula. DKI Jakarta memiliki konflik pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta yang melibatkan para pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi D DPRD DKI Jakarta, PT Godang Tua Jaya, dan Komisi A DPRD Kota Bekasi.<sup>25</sup>

**Penanggulangan sampah**, permasalahan sampah yang ada tentunya harus ditangani, dalam penelitian yang dilakukan oleh Magnani, N dengan judul *Nonhuman Actors, Hybrid Networks, and Conflicts Over Municipal Waste Incinerators*, menjelaskan bahwa Studi sosiologis tentang konflik lingkungan pada infrastruktur pengelolaan sampah terutama

---

<sup>25</sup> Mulyadin, R. Mohama., Iqbal, Mohamad & Ariawan, Kuncoro. (2016). Konflik Pengelolaan Sampah Di Dki Jakarta Dan Upaya Mengatasinya (Conflict Of Waste Management In Dki Jakarta And Its Recommended Solutions). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No.2 179-191

*insinerator*, ini adalah teknologi pengelolaan sampah yang ditawarkan dalam penanggulangan sampah. DKI Jakarta seperti Bantargebang sebagai proyek pemerintah dalam hal penanggulangan sampah di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi merupakan suatu proyek yang melibatkan masyarakat sekitarnya karena dapat berdampak positif dan negatif.<sup>26</sup> Faktor penyebab konflik antara lain pengelolaan TPA Bantargebang dinilai berbagai kalangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, adanya ketidakharmonisan dan ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengolah sampah, serta belum berjalannya sistem pengelolaan sampah *Intermediate Treatment Facility* (ITF).

Pengelolaan sampah perlu membangun teknologi sampah ramah lingkungan karena payung hukumnya sudah ada, seperti Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di dalam Kota.<sup>27</sup> Beberapa contoh inovasi dalam pengolahan sampah yang ada seperti, pemberian informasi dan pendidikan untuk mempopulerkan program daur ulang, kerjasama dan kemitraan ( seperti pembuatan kompos dalam limbah sampah), program penghargaan (*award*) pengurangan sampah, *eco-labelling* (pelabelan pada produk yang memberikan informasi tentang persentase konten yang dapat

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *ibid*



di daur ulang pada suatu produk dapat membantu konsumen untuk memilih produk yang ramah lingkungan).<sup>28</sup>

Pengelolaan sampah tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan sistem manajemen yang baik dalam pengelolaan sampah dari pemerintah dan masyarakat dapat terwujud karena adanya organisasi yang bertanggung jawab dengan struktur organisasi yang jelas. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik seringkali mengalami kendala, oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk menyelesaikannya. Kendala bagi penyediaan layanan publik di antaranya adalah infrastruktur, sumber daya, dan kerangka kelembagaan pelayanan publik.<sup>29</sup>

**Resolusi konflik**, resolusi konflik menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.<sup>30</sup> Simon Fisher (2001) menawarkan beberapa cara mengelola konflik seperti, memfasilitasi dialog, mediasi, negosiasi, kekuasaan, arbitrase.<sup>31</sup> Dalam resolusi konflik formal lebih standar yang melibatkan orang ketiga yang objektif yang berfungsi sebagai mediator sama-sama melindungi hak-hak subjek dan memfasilitasi

---

<sup>28</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, 2014, Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, *Jurnal EnviroScientiae* 1978-8096

<sup>29</sup> .Asti., H.Adi., M.Noeng., (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Issn 1858-1196 11(2)

<sup>30</sup> Simon fisher, 2001, *Mengelola Konflik*. Indonesia: The British Council.

<sup>31</sup> *Ibid*, 112

lingkungan yang terkendali di mana terjadi kesepakatan secara damai.<sup>32</sup> Mediasi sebagai “proses manajemen konflik di mana pihak yang berselisih mencari bantuan, atau menerima tawaran bantuan dari, individu, kelompok, negara, atau organisasi untuk menyelesaikan konflik mereka atau menyelesaikan perbedaan mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik atau menggunakan otoritas hukum.<sup>33</sup>

Dalam meneliti kasus konflik lingkungan di Beijing, yang pertama mengidentifikasi enam strategi pemerintah yang berbeda: menyelesaikan sendiri oleh pemerintah, penindasan, pengurangan ketegangan konflik, menyerah, negosiasi tanpa bantuan, dan mediasi.<sup>34</sup> Kebijakan pemerintah juga dapat mengatasi konflik lingkungan yang terjadi di masyarakat. *When Frames Conflict: Policy Dialogue on Waste* yang ditulis oleh Saarikoski, H, menjelaskan konflik lingkungan dapat diatasi dengan penanganan melibatkan pemerintah atau kebijakan pemangku kepentingan dan komunikasi yang baik.

Eleanor Phillips dan Ric Cheston dalam jurnalnya *Conflict Resolution What Works?*, menjelaskan beberapa resolusi konflik yang ditawarkan antara lain; *pertama* paksaan, satu pihak menggunakan superior kekuasaan untuk memaksakan keputusan pada orang lain. Kekuatan tersebut dapat

---

<sup>32</sup> Phillip D. Robinette dan Robert A. Harris, 1998, A Conflict Resolution Model Amenable to Sociological Practice, *Clinical Sosiologi Riview* Vol.7, No.

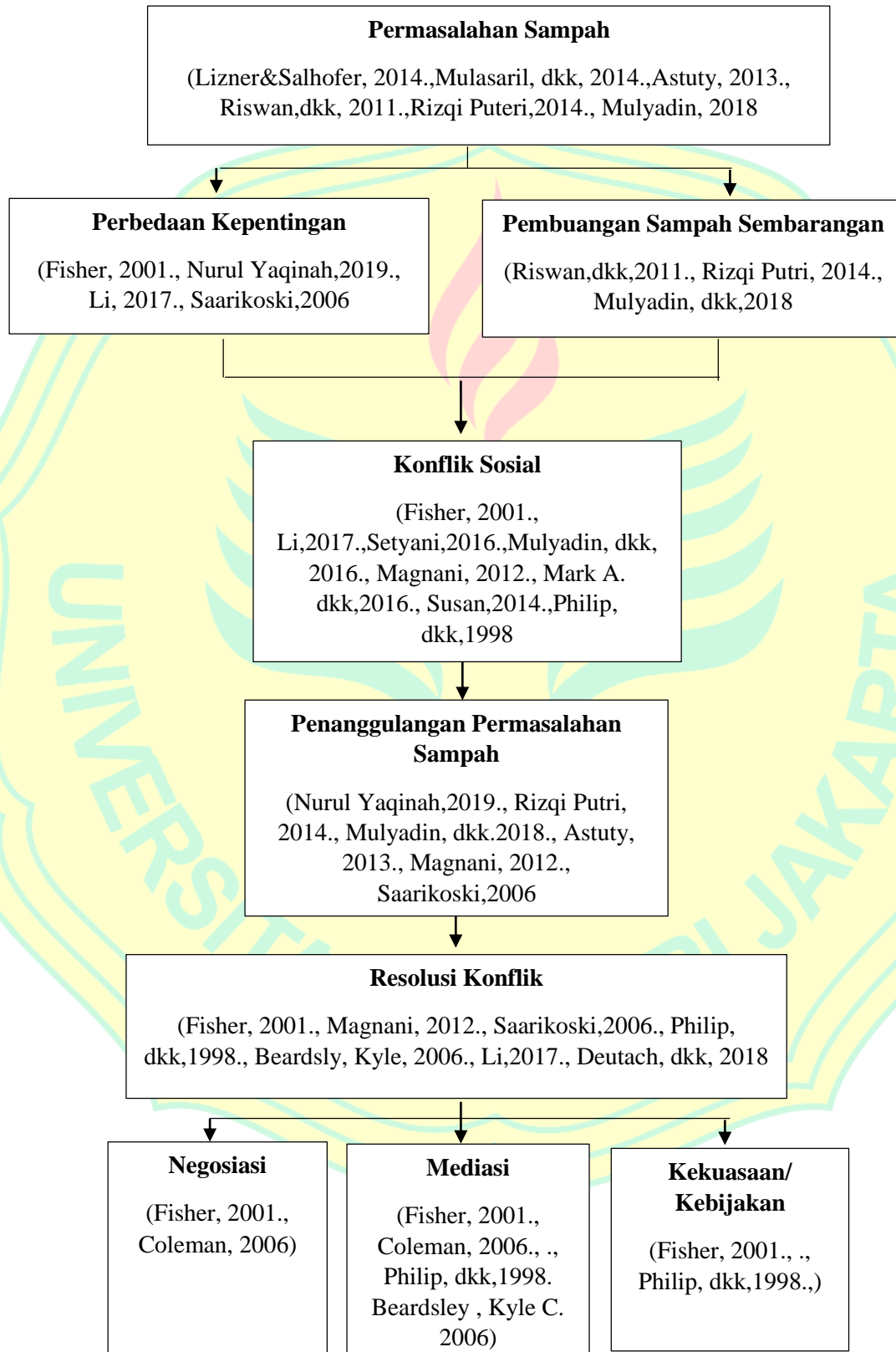
<sup>33</sup> Beardsley , Kyle C. (2006). Mediation Style And Crisis Outcomes. Sage Publications : *Journal Of Conflict Resolution*. Vol 50 No 1 Issn-2158-22440

<sup>34</sup> Yanwei Li, 2017, Governing environmental conflicts in China: Lessons learned from the case of the Liulitun waste incineration power plant in Beijing, *Public Policy and Administration* 2158-22440

berasal dari manajemen posisi otoritas atau dari dukungan dari atasan. Situasinya mungkin terstruktur untuk mendapatkan kekuasaan, atau kekuasaan dapat diperoleh dengan menang atas koalisi.

*Kedua*, Pemecahan masalah: Resolusi bersama. Pesta untuk konflik mencari solusi yang akan memuaskan tujuan masing-masing, pertama berbagi fakta dan perasaan, kemudian mencari solusi yang dapat diterima bersama-sama. Manfaat utama adalah komitmen bersama untuk solusi, dan pembentukan dasar untuk menyelesaikan konflik di masa depan. *Ketiga*, Kompromi: yang *Gioe-dan-take*. Pihak - pihak tawar-menawar untuk membagi perbedaan masing-masing dan harus menyerahsatu sama lain. Negosiasi dapat dilakukan dengan dua cara seperti negosiasi secara langsung maupun melalui pihak ketiga. *Keempat*, Penghindaran. Coleman (2006) dalam bukunya *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice Second Edition* menawarkan gambaran yang komprehensif tentang bidang resolusi konflik, menekankan manajemen konstruktif dari konflik dan mencari solusi *win-win solution*.

### Skema 1.1 Tinjauan Peneitian Sejenis



(Sumber: Analisis Penulis, 2022)

Melihat Tinjauan penelitian sejenis dalam skema I.I, selanjutnya peneliti akan menjelaskan posisi penelitian, seperti menjelaskan bagaimana gambaran konflik laten yang ada di masyarakat karena pengelolaan sampah yang belum baik. Kemudian menjelaskan pula bagaimana peran pengelolaan sampah yaitu BUMDes Amar Jaya dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk solusi atas konflik laten yang terjadi di masyarakat. Sehingga peneliti diharapkan mampu menjelaskan tahap-tahap resolusi konflik yang telah di tempu masyarakat Desa Babakanreuma khususnya sekitar aliran sungai dan peran pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dalam proses resolusi konflik.

Analisis teori yang digunakan peneliti menggunakan teori konflik Simon Fisher, yang kemudian peneliti mampu menyimpulkan konflik seperti apa yang terjadi di Desa Babakanreuma dalam pengelolaan sampah di masyarakat, menjelaskan apa saja tahap-tahap yang telah ditempuh dalam resolusi konflik laten terkait pembuangan sampah sembarangan. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas studi konflik secara general dalam konflik lingkungan serta penanggulangannya, sedangkan penelitian ini akan menjabarkan konflik laten beserta resolusi yang telah dilakukan masyarakat terkait permasalahan sampah.

## 1.6. Kerangka Konseptual

### 1.6.1. Konflik Laten Simon Fisher

Simon Fisher (2001) menjelaskan bahwa konflik merupakan fakta kehidupan yang tak terhindarkan dan seringkali kreatif.<sup>35</sup> . Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan yang tidak sesuai.<sup>36</sup> Seperti yang dikatakan sosiolog, konflik terjadi ketika tujuan sosial tidak selaras. Menurut Simon Fisher (2001) konflik berasal dari adanya ketidakseimbangan diantara hubungan manusia, sosial, ekonomi maupun kekuasaan.<sup>37</sup>

Menurut Simon Fisher (2001), konflik akan selalu ada dan selalu diperlukan. Konflik tidak selalu dipandang sebagai hal yang negatif, namun terkadang konflik dapat diartikan sebagai hal yang positif. Menurut Simon Fisher, berbagai manfaat konflik antara lain membuat orang sadar akan masalah, mendorong perubahan untuk mencari solusi, merangsang antusiasme, pertumbuhan pribadi, meningkatkan kesadaran diri, mendorong pertumbuhan psikologis dan menciptakan kegembiraan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 4

Gambar 1.1 Sasaran dan Perilaku

S A S A R A N			
P E R I L A K U	Perilaku yang selaras	<b><u>Tanpa Konflik :</u></b> Setiap masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. <sup>39</sup>	<b><u>Konflik Laten:</u></b> Sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. <sup>40</sup>
	Perilaku yang Tidak selaras	<b><u>Konflik dipermukaan:</u></b> Memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar, dan muncul hanya karena kesalahan pemahaman terhadap sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. <sup>41</sup>	<b><u>Konflik terbuka:</u></b> Berakar yang sangat dalam dan nyata, serta memerlukan tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.. <sup>42</sup>

(Sumber: Simon Fisher, 2001, Mengelola Konflik)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, Ada banyak jenis konflik, masing-masing dengan potensi dan tantangannya sendiri. *Pertama*, tanpa konflik, setiap masyarakat yang damai, jika ingin langgeng, harus hidup dengan vitalitas dan dinamisme, memanfaatkan perilaku dan tujuan yang saling bertentangan, dan mengelola konflik dengan cerdas. *Kedua* potensi konflik ini bersifat laten dan harus diangkat ke permukaan agar dapat diselesaikan secara efektif. *Ketiga* konflik tersebut bersifat terbuka, berakar, dan nyata,

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *ibid*

dan memerlukan tindakan untuk mengatasi sebab dan akibat. *Empat* konflik permukaan, yang berakar dangkal atau tidak berakar, semuanya berakar pada kesalahpahaman tujuan dan dapat diselesaikan dengan meningkatkan komunikasi.<sup>43</sup>

Simon Fisher (2001) terdapat beberapa cara dalam menangani konflik yang ada di masyarakat. diantaranya adalah *Pencegahan Konflik*, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik. *Penyelesaian konflik*, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. *Resolusi konflik*, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. *Transformasi konflik*, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.<sup>44</sup>

Simon Fisher (2001) menjelaskan bahwa alat analisis konflik adalah proses praktis untuk mempelajari dan memahami realitas konflik dari perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah pra-konflik, di mana terjadi ketidaksesuaian tujuan antara dua pihak atau lebih, yang berujung pada konflik.<sup>45</sup> Konflik ini tertutup dari pandangan publik, meskipun satu atau lebih pihak mungkin

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 19



menyadari potensi konflik, tetapi mereka lebih memilih untuk menghindari kontak satu sama lain.<sup>46</sup> *Kedua* konfrontasi, konfrontasi, pada tahap ini konflik menjadi lebih terbuka.<sup>47</sup> Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, para pendukung dapat mulai melakukan demonstrasi atau tindakan konfrontasi lainnya.<sup>48</sup> Terkadang, perkelahian atau kekerasan tingkat rendah lainnya terjadi antara kedua belah pihak. Hubungan kedua pihak menjadi sangat tegang.<sup>49</sup>

*Ketiga* krisis, ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat.<sup>50</sup> Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh, komunikasi normal diantara kedua pihak kemungkinan putus.<sup>51</sup> Pertanyaan-pertanyaan umum cenderung menuduh dan menentang pihak-pihak lainnya.<sup>52</sup> *Keempat* akibat, suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat.<sup>53</sup> Keberadaan satu pihak dapat menundukkan pihak lain; atau pihak lain dapat menyerah atas permintaan pihak lain; atau bahkan kedua belah pihak sepakat untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara.<sup>54</sup> Pihak yang berkuasa atau pihak ketiga lain yang lebih berkuasa dapat

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

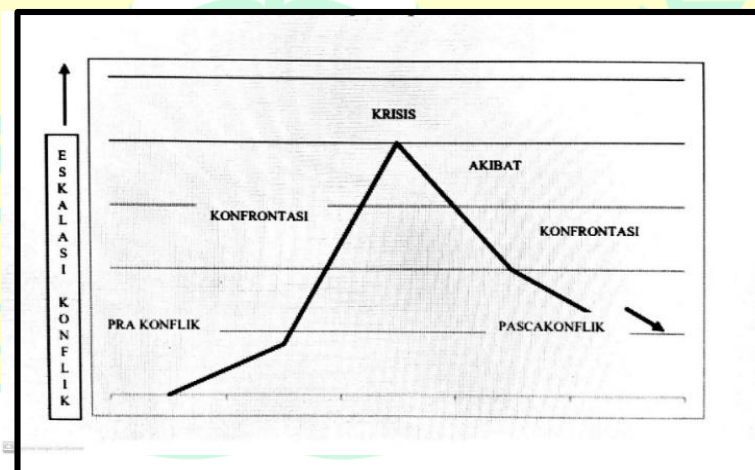
<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan. Terlepas dari situasinya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini akan sedikit berkurang, dapat dipecahkan.<sup>55</sup>

*Kelima* pasca konflik, langkah ini merupakan langkah terakhir. Dengan berhentinya semua jenis bentrokan kekerasan, situasi telah teratasi, ketegangan telah mereda dan hubungan antara kedua belah pihak telah bergerak ke arah yang lebih normal.<sup>56</sup> Namun, tahap ini kembali ke tahap pra-konflik jika isu dan masalah yang muncul sebagai akibat dari tujuan yang saling bertentangan tidak diselesaikan dengan baik.<sup>57</sup> Berikut tahapan konflik yang terjadi dalam periode waktu tertentu.

**Gambar 1.2 Tahap-Tahap Konflik Sebagai Alat Bantu Analisis**



(Sumber: Simon Fisher, 2001, Mengelola Konflik)

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa, adanya dinamika didalam suatu konflik dengan tahapan-tahapan tertentu. Artinya menurut pandangan peneliti tahapan konflik pasti terjadi di suatu daerah. Bisa saja di suatu daerah terjadi pada tahap perang dan konflik yang lebih terbuka lainnya. Simon Fisher (2001) menjelaskan terdapat beberapa pengelolaan konflik yang dapat dilakukan secara langsung diantaranya: persiapan intervensi, meningkatkan kesadaran dan mobilisasi untuk mendukung perubahan, pencegahan, mempertahankan kehadiran, dan memungkinkan suatu penyelesaian.<sup>58</sup>

#### **1.6.2. Resolusi Konflik dalam Simon Fisher**

Menurut Simon Fisher, beberapa langkah bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Istilah yang diciptakan oleh Simon Fisher (2001) menunjukkan cara yang berbeda untuk mengelola konflik. Manajemen konflik berupaya membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong semua pihak yang berkonflik untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih positif.

Terdapat beberapa cara dalam mengelola konflik menurut Simon Fisher yaitu dengan: konflik pertama yang berupa pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulkan konflik yang keras. Konflik yang kedua penyelesaian konflik, bertujuan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 95

untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian. Konflik yang ketiga pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Konflik yang keempat resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Kelima transformasi konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.<sup>59</sup>

Simon Fisher dan lain-lain berpendapat bahwa konflik dapat diselesaikan dengan memfasilitasi dialog, dalam mengelola konflik kita perlu terus mencari cara untuk meningkatkan kemungkinan dialog antar pihak.<sup>60</sup> *Memfasilitasi dialog* adalah keterampilan yang sangat berguna selama fase konfrontasi sebelum situasi berkembang menjadi krisis.<sup>61</sup> Memfasilitasi dialog adalah situasi yang memungkinkan orang untuk berbagi pandangan dan mendengar perspektif yang berbeda tentang masalah politik atau

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>61</sup> *Ibid*

sosial.<sup>62</sup> Kesepakatan bukanlah tujuan utama dari dialog, tetapi diperlukan suatu pengertian anantara kedua belah pihak.<sup>63</sup>

*Negosiasi*, di definisikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda.<sup>64</sup> Dalam banyak kasus negosiasi berlangsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Tujuannya untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu atau masalah dan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi ini pada prinsipnya berlangsung diantara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, ketika jalur komunikasi antara keduanya belum betul-betul putus, atau pada tahap lebih lanjut, ketika kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat dari rinciannya untuk mencapai penyelesaian secara damai.<sup>65</sup>

Dalam situasi dimana tingkat konfrontasi dan kekerasan menyulitkan bagi kedua belah pihak untuk sepakat bertemu dan melakukan negosiasi secara langsung, mungkin ada pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu komunikasi secara tidak langsung. Fasilitator ini dapat menyiapkan landasan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

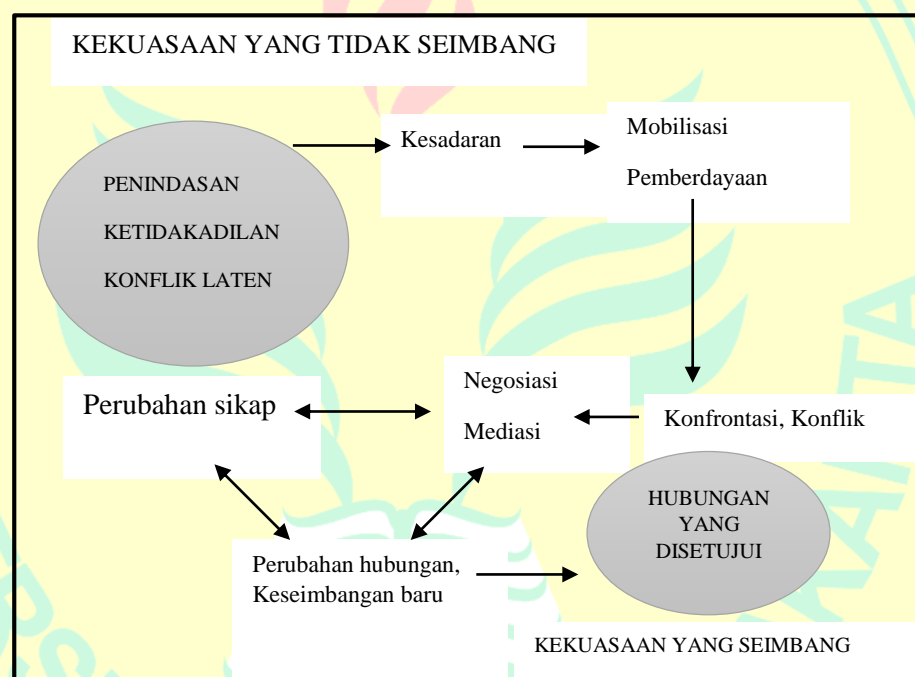
<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

bagi negosiasi selanjutnya secara langsung.<sup>66</sup> *Mediasi*, sama seperti negosiasi yang mencari suatu penyelesaian dengan kesepakatan, namun didalam mediasi menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin adalah sukarelawan, atau seseorang yang diminta oleh kedua pihak untuk menjadi mediator.<sup>67</sup>

**Gambar 1.3 Menyeimbangkan Kekuasaan**



(Sumber: Simon Fisher, 2001, *Mengelola Konflik*)

Terdapat *negosiasi, mediasi dan kekuasaan*. Metode ini dikembangkan oleh Diana Francis dan Guus Mayer untuk menyusun metode intervensi konflik dan hubungan kekuasaan. Situasi bergerak dari kekuasaan yang tidak seimbang, yang tercermin dari

<sup>66</sup> *ibid*

<sup>67</sup> *ibid*

tindakan penindasan, ketidakstabilan dan konflik laten dan kemudian beralih ke kekuasaan yang seimbang, dimana hubungan dapat dijalin kembali dalam suasana yang saling dapat menerima.<sup>68</sup>

### 1.6.3. Pengelolaan Sampah dan Permasalahannya

Menurut ahli sosiologi lingkungan, berbagai persoalan lingkungan tidak yang ada tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh manusia<sup>69</sup>. Dalam Susilo (2014) Parson mengatakan bahwa manusia dapat menjadi perusak lingkungan. Pramudya Sunu (2001) dalam Susilo menyatakan bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. *Pertama*, kerusakan karena faktor internal, yaitu kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat sendiri, kerusakan ini sukar dihindari karena bagian dari proses alam. Tidak sedikit kejadian ini dalam waktu singkat, namun dampak atau akibat yang diterima dalam waktu lama. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanyalah mempersiapkan diri atau manajemen bencana guna meminimalkan banyaknya korban.

*Kedua*, kerusakan faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai suatu akibat dari kegiatan-kegiatan, seperti

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>69</sup> Rachmad K Dwi Susilo, 2014, MA., Ph.D, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang dibuang kesungai.<sup>70</sup> Pembuangan sampah juga menjadi salah satu kerusakan lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan juga dapat disebabkan karena teknis keruangan yang kurang memadai, permasalahan pengelolaan sampah menurut Kodoatie (2003:219) secara umum persoalan yang muncul pada pengelolaan sampah di daerah adalah sebagai berikut<sup>71</sup>:

a. Aspek kelembagaan

Permasalahan yang pertama yaitu aspek kelembagaan yang dimana sumber daya yang kurang memadai dari segi kualifikasinya. Lalu tidak sesuainya suatu bentuk kelembagaan dengan besarnya tugas (kewenangan) yang harus dilakukan.

b. Aspek teknis operasional

Permasalahan sampah yang ada di daerah seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di daerah tersebut. misalnya saja container, pengangkutan, pembuangan di TPA dan pengolahan di TPA.

c. Aspek pembiayaan

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Kodoatie, Robert J, 2003, *Manajemen Rekayasa dan Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Pada aspek pembiayaan sendiri, terdapat biaya yang diperlukan dalam pengelolaan sampah masyarakat desa. misalnya saja retribusi yang kurang memadai.

d. Aspek pengaturan

Aspek pengaturan, tidak memiliki suatu kebijakan yang mengatur terkait pengolahan sampah di daerah yang nantinya dapat memberikan keadaran pada masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola sampah.

e. Aspek peran serta masyarakat

Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah menyebabkan permasalahan sampah terjadi di masyarakat daerah, ini t dapat dilihat masih sedikitnya masyarakat yang mengelola sampah dengan baik. Salah satu dari tidak sefesienya dalam pengelolaan sampah yakni karna minimnya dukungan dari pemerintah. Dengan demikian pemerintah diharap dapat mengatasi permasalahan sampah secara sistematis dan neyeluruh. Minimnya dukungan dari pemerintah pula masyarakat beranggapan bahwa sungai adalah tempat pembuangan sampah. Karena minimnya kesadaran akan pengelolaan sampah. Selain itu, akibat lainnya adalah masyarakat banyak yang mengelola sampah

secara konvensional seperti dibakar atau ditimbun ke tanah.<sup>72</sup>

TPS ilegal kemungkinan disebabkan karena pengetahuan dan sikap masyarakat tentang lingkungan yang tidak baik. Pengetahuan dan sikap yang tidak baik tersebut menyebabkan perilaku membuang sampah yang tidak baik pula. Sarana prasarana yang belum merata di seluruh wilayah dan sumber daya manusia yang belum terpenuhi menjadi permasalahan utama selain kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah.<sup>73</sup>

Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (2011) banyak permasalahan yang dapat ditemui dalam pengelolaan kebersihan seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peraturan dan anggaran dana yang memadai, sehingga membuat tidak dapat menyediakan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan teknis akibatnya pencemaran lingkungan menjadi meningkat. Berbagai potensi yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran akibat sampah meliputi<sup>74</sup>:

---

<sup>72</sup> Reni Astuty Manurung, 2013, Peran Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa), Kementerian Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Indonesia, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* Volume 1 Nomor 3

<sup>73</sup> *ibid*

<sup>74</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2011, *Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman*

1. Pencemaran udara Sampah yang menumpuk serta tidak tertutup dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau yang tidak sedap.
2. Pencemaran air prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan *leachate* terutama pada saat turun hujan. Aliran *leachate* yang mengalir ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran air dan air tanah.
3. Pencemaran tanah dan pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik akan membuat lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung bahan buangan berbahaya (B3) yang membutuhkan waktu yang cukup lama sampai terdegradasi.
4. Dampak sosial hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukiman. Keresahan warga setempat diakibatkan oleh gangguan-gangguan yang telah disebutkan di atas.

Dibutuhkannya suatu pengelolaan untuk mengatasi suatu permasalahan akibat adanya sampah yang tidak di tangani dengan baik. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah adalah mengelola, mendaur ulang

atau membuang sampah domestik dengan benar.<sup>75</sup> Pemerintah daerah memiliki peran khusus dalam pengelolaan sampah, yaitu<sup>76</sup>:

- Pengatur kebijakan (Regulator) Nishimoto (1997:15) lebih lanjut menjelaskan peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah berhak merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan nasional.
- Penyedia Jasa Peran pemerintah sebagai penyedia jasa pengelolaan sampah berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk memajukan, mengembangkan dan melaksanakan pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan sampah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Peran lain pemerintah dalam pengelolaan sampah membuat suatu program.

#### **1.6.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan usaha Milik Desa adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian usaha besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan dan usaha

---

<sup>75</sup> Tri Kharisma Jati, Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai), *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16

<sup>76</sup> *Ibid*

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>77</sup> Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menjadi pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.

BUMDes dibentuk dengan berbagai ragam tujuan seperti yang tercantum pada Pemdesa No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 yaitu:

- Meningkatkan perekonomian desa
- Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- Meningkatkan masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa
- Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

---

<sup>77</sup> Farida Yustina, Arief Purbantara, Sugiarti S. *Pusat penelitian dan pengembangan pendidikan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Modul KKN Tematika Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA).2019*

- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PAD)

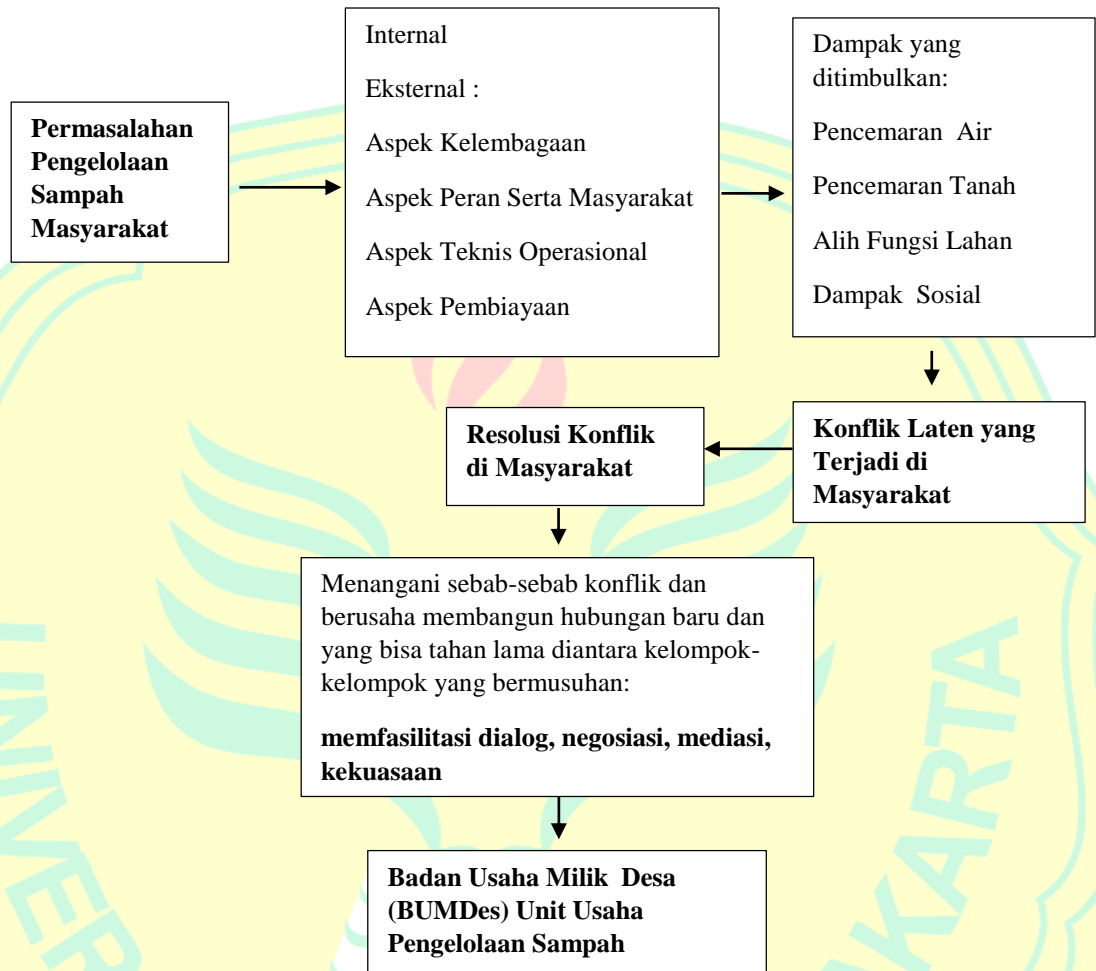
Permendes Nomor 4/2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran. Badan Usaha Milik Desa Pasal 19 menyatakan beberapa jenis usaha yang dapat digunakan untuk mengembangkan bidang usaha, antara lain:

- Bisnis sosial yaitu bisnis dengan cara memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan. dalam kategori ini adalah air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- Bisnis penyewaan (*renting*) adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa seperti alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan lainnya.
- Usaha perantara yaitu memberikan jasa pelayanan kepada warga bisa dalam bentuk jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat atau jasa pelayanan lainnya.

- Bisnis keuangan adalah memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa.
- Usaha Bersama merupakan induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur/dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama, jenis usaha ini misalnya pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspresif, desa wisata yang mengorganisi rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat ataupun kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis-jenis usaha lokal lainnya.

### 1.6.5. Hubungan Antar Konsep

Skema 1. 2 Hubungan Antar Konsep



(Sumber: Analisis Penulis, 2022)

Berdasarkan skema 1.4 pada halaman sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di masyarakat ini terdiri dari beberapa aspek yang tidak dijalankan atau tidak seimbang. *Pertama* aspek kelembagaan, ini terkait dengan sumber daya manusia yang kurang memadai dari segi jumlah maupun kualifikasinya. *Kedua*, aspek teknis operasional, Pada aspek



teknis operasional, permasalahan yang sering muncul adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat sehingga pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. *Ketiga* aspek pembiayaan, permasalahan pada aspek pembiayaan adalah terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.

*Keempat* aspek pengaturan yaitu tidak dimilikinya kebijakan pengaturan pengelolaan sampah di daerah yang mampu memberikan motivasi kesadaran peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masyarakat. *Kelima* aspek peran serta masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini juga dapat diketahui dari masih sedikitnya masyarakat yang belum dapat mengolah sampah dengan baik, kesadaran masyarakat akan lingkungan yang masih membuang sampah kesungai, mengelola dengan cara konvensional dengan dibakar dan ditimbun membuat lingkungan dapat tercemar.

Aspek-aspek tersebut memberikan dampak dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Seperti menimbulkan polusi air, polusi udara, polusi tanah dan dampak sosial bagi masyarakat. Dampak sosial bagi masyarakat tentunya dapat terjadi suatu konflik yang ada di masyarakat dimana berawal dari pengelolaan sampah masyarakat yang kurang baik. Permasalahan akan sampah perlu di angkat kepermukaan guna dapat

menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat ini biasa di sebut dengan adanya konflik laten. Untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat dibutuhkan suatu resolusi konflik, dalam kasus yang terjadi di Desa Babakanreuma tahapan resolusi konflik yang di tempu ada 3 yakni memfasilitais dialog, negosiasi, mediasi, kekuasaan.

Resolusi dari Pemerintah Desa Babakanreuma membuat pengelolaan Sampah oleh BUMDes dengan memfokuskan unit usahanya nya pada lingkungan, selain menjaga lingkungan agar tetap bersih ini juga menjadikan pemasukan dana bagi pemerintah desa setempat dan membuka lapangan pekerjaan. Dampak lainnya yakni masyarakat semakin sadar akan kebersihan lingkungan dengan dibiasakan membangun sampah melalui BUMDes.

## **1.7. Metodologi Penelitian**

### **1.7.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang menggali realitas kontemporer (kasus). pengumpula data yang detail dan mendalam mengenai berbagai sumber informasi dan laporkan deskripsi kasus dan topik kasus

kehidupa .<sup>78</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, studi literatur, disertai dengan dokumentasi dalam proses penelitiannya. Dokumentasi didapat ketika peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan. Misalnya saja ketika peneliti melakukan observasi ke sungai, ke BUMDes Amar jaya, ke kantor pemerintah Desa Babakanreumsa, dan pada saat melakukan pengamatan secara langsung mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

### 1.7.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebagai data penelitian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Subjek penelitian dilihat sebagai informan yang memberikan informasinya kepada peneliti, subjek penelitian juga merupakan orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.<sup>79</sup> Subjek penelitian dilihat sebagai informan, yang merupakan orang dalam pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.<sup>80</sup>

Sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria diantaranya (1) mereka yang menguasai atau

---

<sup>78</sup> John W. Creswell, 2015, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 26.

<sup>79</sup> Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal.132

<sup>80</sup> *Ibid*

memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. Lalu (2) mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Selanjutnya (3) mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Kemudian (4) mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri. Dan terakhir (5) mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.<sup>81</sup>

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Babakanreuma sekaligus pengurus BUMDes Amar Jaya, petugas BUMDes Amar Jaya, Masyarakat Desa Babakanreuma sekitar aliran sungai.

**Tabel 1.1 Tabel Subjek Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa/ Pembina BUMDes Amar Jaya Babakanreuma	Informan kunci	1
2.	Sekretaris Desa Babakanreuma	Informan kunci	1
3.	Warga Desa Babakanreuma	Informan kunci	4
4.	Warga Babakanreuma sebagai Petugas BUMDes Amar Jaya	Informan tambahan	5
Jumlah			11

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2021)

<sup>81</sup> Hardani, Andriani & dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020). Hlm: 132

### **1.7.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 1 Desember 2021 – 8 April 2022. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena permasalahan terkait sampah di Desa Babakanreuma sudah sejak lama terjadi sebagai bentuk konflik namun baru dapat teratasi setelah pemerintah membuat program pengelolaan sampah BUMDes Ama Jaya.

### **1.7.4. Peran Peneliti**

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam penelitian. Peneliti memiliki peran sebagai pengamat, perencana, pelaksana, pengumpul data, kemudian sebagai penganalisis data dari berbagai data yang didapatkan dalam proses penelitian. Selain itu peneliti juga memiliki peran untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti telah melakukan observasi dan telah mendapatkan persetujuan dari berbagai subyek penelitian yang berkaitan dengan BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu resolusi konflik yang terjadi di masyarakat untuk menambah dan mendukung data yang dibutuhkan. Penelitian ini juga didukung oleh subjek informan yang telah memberikan informasinya mengenai respon masyarakat terkait BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma sebagai suatu resolusi konflik yang dilakukan untuk menangani permasalahan sampah di Desa Babakanreuma.

### 1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggali dan memahami pandangan banyak individu atau kelompok tentang masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>82</sup> Penelitian kualitatif sedapat mungkin menuntut peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan, atau memiliki pengalaman di lapangan. Dengan demikian membantu peneliti memahami latar belakang subjek dan berbagai sudut pandang, disamping itu membuat subjek menjadi lebih dekat dengan peneliti di lapangan, sehingga meminimalisir "efek pengamat" (*the observer effect*).<sup>83</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1.7.5.1 Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sukmadinata (2005) menyatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory*

---

<sup>82</sup> John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 04

<sup>83</sup> Hardani, Andriani & dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm 19.

*observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan<sup>84</sup>

Peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan maksud meninjau secara langsung bagaimana Resolusi konflik melalui pengelolaan sampah BUMDes Amar Jaya Desa Babakanreuma. Seperti melakukan pengamatan, pengambilan dokumentasi dilapangan. Observasi dilakukan guna mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Desa Babakanreuma. Seperti di BUMDes Amar Jaya, masyarakatnya, sekitar aliran sungai, kantor desa.

#### **1.7.5.2 Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar-pribadi bersemuka (*face-to-face*), Ketika seseorang -yakni pewawancara- mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang

---

<sup>84</sup> *Ibid*

diwawancara (responden/informan).<sup>85</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yang dikenal secara umum yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1988), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.<sup>86</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi penting yang kemudian ditransformasikan menjadi data dengan menggali informasi tersebut. Peneliti mewawancarai informan tentang konflik yang terjadi di desa Babakanreuma, kemudian mempertanyakan konteks konflik yang terjadi di masyarakat. Selain itu peneliti juga mewawancarai informan mengenai latar belakang didirikannya BUMDes Amar Jaya sebagai suatu resolusi konflik yang terjadi di masyarakat Desa Babakanreuma

---

<sup>85</sup> Kerlinger, Fred N. 2006. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 770

<sup>86</sup> Hardani, Andriani & dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020). Hlm: 138



### 1.7.5.3 Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Salah satu penunjang dalam penelitian yaitu dokumentasi. Dokumentasi dapat berbentuk foto, menghasilkan data deskriptif yang sangat berharga, dan sering digunakan untuk menguji aspek subjektif, dan seringkali analisis induktif dari hasil. Ada dua jenis foto yang dapat digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu yang dibuat oleh orang dan yang dibuat oleh peneliti sendiri.<sup>87</sup>

Peneliti melakukan studi literatur dengan memotret atau memotret kondisi masyarakat desa Babakanreuma dan BUMDes Amar Jaya, dilanjutkan dengan kegiatan pengelolaan sampah, dan kegiatan masyarakat untuk pengumpulan sampah di masing-masing desa. Selain itu, peneliti juga memotret keadaan sungai setelah dilakukan pengelolaan sampah.

Studi kepustakaan digunakan peneliti guna memperkuat penelitian. Studi kepustakaan yang peneliti gunakan seperti melalui buku-buku, internet, jurnal, disertasi dan tesis. Internet menjadi salah satu yang digunakan peneliti dalam studi kepustakaan, mengingat adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan untuk di rumah.

---

<sup>87</sup> Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm: 159

Namun, peneliti tetap menggunakan Sinta dan Scimago dengan *rate* sebagai kriteria dan aturan yang dapat dipertanggung jawabkan.

### 1.7.6 Triangulasi Data

Menurut Patton (2009) Triangulasi data merupakan penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik pandang yang berbeda.<sup>88</sup> Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>89</sup>

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh yang berperan aktif dimasyarakat yang dimana tokoh masyarakat tersebut memiliki peran yang besar bagi masyarakat sekitar aliran sungai dalam pengelolaan sampah masyarakat. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam setiap kegiatan maupun permasalahan yang ada di masyarakat adalah DR. Udin yang berprofesi sebagai kepala sekolah

---

<sup>88</sup> Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 99

<sup>89</sup> *Ibid*

SMAN 1 Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Peran beliau dalam masyarakat yakni sebagai tokoh yang di hormati karena beliau memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai anggota masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, selain itu dalam kontribusi pengelolaan sampah DR. Udin merupakan tokoh yang mengatur dan berperan aktif sebelum dan sesudah BUMDes Amar Jaya beroperasi.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ketiga bagian tersebut kemudian akan disempurnakan menjadi lima bab pembahasan, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II DAN BAB III Hasil Penelitian, Bab IV Analisis dan Bab V Kesimpulan, yang akan didasarkan pada temuan dan analisis Konsep di lapangan disusun dan sistematis.

BAB I, bab ini diawali dengan gambaran konteks penelitian hingga fokus utama pertanyaan penelitian yang muncul. Konteks ini menggambarkan adanya permasalahan lingkungan yang muncul pada masyarakat pedesaan karena tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan potensi konflik antar warga. Peneliti juga menguraikan masalah penelitian yang berusaha memusatkan perhatian pada fenomena yang diteliti dan membaginya menjadi tiga rumusan masalah. Tujuan penelitian juga dijelaskan dalam penelitian ini untuk validasi penelitian. Selain itu, tinjauan penelitian yang sama juga disajikan sebagai literatur populasi untuk penelitian ini. Kemudian, kerangka

konseptual sebagai objek analisis hasil direfleksikan secara sosiologis. Terakhir, dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan sistematika penelitian

BAB II, BAB II, pada bab ini peneliti melakukan kajian awal dengan memberikan gambaran gambaran tentang konteks sosial masyarakat di desa Babakanreuma, bab ini juga dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya adalah deskripsi lokasi desa, konteks sosial masyarakat dan lainnya. Selain mendeskripsikan Desa Babakanreuma peneliti pula mendeskripsikan BUMDes Desa Babakanreuma mulai dari struktur kepengurusan, gambaran umum BUMDes , dan unit usaha.

BAB III, Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan sesuai dengan kriteria peneliti. Pada bab ini dibagi kedalam beberapa subbab, makna lingkungan bagi masyarakat sekitar aliran sungai, konflik laten dalam pengelolaan sampah, konflik laten akibat membuang sampah sembarangan, upaya awal mengatasi konflik laten dari masyarakat dan resolusi konflik melalui dukungan pemerintah desa dengan program BUMDes Amar Jaya unit usaha pengelolaan sampah .

BAB IV, pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis konflik laten menurut Simon Fisher beserta resolusi konflik yang terjadi di masyarakat dengan kaitanya terhadap pengelolaan sampah yang ada di masyarakat, peran actor dalam resolusi konflik dan peningkatan kesadaran melalui pendidikan lingkungan.

BAB IV, Pada bab kelima ini, bab yang menjadi penutup skripsi ini. dimana di dalamnya berisikan kesimpulan, rekomendasi, gambaran umum, dan jawaban tentative atas permasalahan penelitian skripsi ini.

